



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 23 Maret 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om swastyastu, Namó Buddhaya

Salam Kebajikan

Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Ykh. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Ykh. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Eksekutif dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Secara teknis LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sekaligus memuat tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati

Izinkan saya membacakan ringkasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019, yang secara lengkap telah tersaji dalam Buku II.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 berdasarkan data proyeksi BPS sebanyak 34.718.204 jiwa meningkat 227.369 jiwa atau 0,66% dibandingkan Tahun 2018, dengan struktur penduduk sebanyak 23.516.110 jiwa berada pada usia produktif (15-64 tahun) dan 11.202.094 jiwa usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,41 persen lebih tinggi dari Tahun 2018 sebesar 5,31 persen, dan bahkan lebih tinggi terhadap nasional yang bertumbuh 5,02 persen. Sejak tahun 2016-2019, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat dari 5,25 persen menjadi 5,41 persen. Yang patut kita syukuri adalah pada tahun 2019, ketika beberapa Provinsi di Pulau Jawa mengalami pelambatan pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah justru mengalami peningkatan.

Tingkat inflasi Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar 2,81 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 sebesar 2,82 persen.

Sejak Tahun 2015 hingga 2019, inflasi Jawa Tengah sangat rendah dan terkendali pada kisaran 2,3 - 3,7 persen. Tren penurunan inflasi sejak Tahun 2015-2019 berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi, serta penguatan kualitas perekonomian Jawa Tengah secara umum. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah akan terus diefektifkan.

Rasio Gini Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 0,358 sedikit lebih tinggi dibanding Tahun 2018. Namun, Rasio Gini Jawa Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2019, yaitu dari 0,390 (2013) menjadi 0,358 (2019) dan terendah antar provinsi di Pulau Jawa. Penurunan Rasio Gini menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah akan terus ditingkatkan melalui peningkatan akses pembiayaan usaha mikro kecil Kredit Usaha Rakyat, Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, dan pengembangan *start up* wirausaha masyarakat.

Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2019 berada pada angka 0,619 turun 0,001 poin dibanding tahun 2018 sebesar 0,620. Penurunan Indeks Williamson sejak Tahun 2013 - 2019 turun 0,019 poin. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2019 sebesar 106 lebih tinggi dibanding akhir tahun 2018 sebesar 103,64. NTP bulanan selama Januari sampai dengan Desember 2019 selalu lebih besar dibandingkan NTP bulanan selama Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2019 sebesar 4,49 persen, turun 0,02 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar 4,51 persen. Sejak Tahun 2014 hingga 2019, TPT Jawa Tengah terus mengalami penurunan, hal ini berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal bagi calon tenaga kerja.

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah mencapai 10,58% dari jumlah penduduk atau 3,679 juta orang dibandingkan tahun 2018 sebesar 11,19% atau 3,867 juta orang. Penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 0,61% atau 188 ribu orang, lebih tinggi dibanding penurunan angka kemiskinan tingkat nasional sebesar 0,44%. Penurunan jumlah absolut penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2019 terbanyak di tingkat nasional diikuti Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Inovasi program penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan 1 SKPD mendampingi 1 Desa miskin yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 akan terus dilanjutkan dan diperluas pada tahun 2020 sampai ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 71,73 naik 0,61 poin dibandingkan Tahun 2018 (71,12). Angka IPM tersebut menunjukkan tren meningkat selama 2014 – 2019, dimana pada tahun 2014 sebesar 68,78. Jawa Tengah telah masuk dalam kategori provinsi dengan IPM Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, pada Tahun 2019 sebesar 91,89 di

atas capaian nasional yang berada pada nilai 91,07. Capaian tersebut semakin mendekati angka 100 yang mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pada Tahun 2019 sebesar 76,99 naik dari tahun 2018 (74,75). Capaian tersebut menunjukkan kinerja birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah semakin baik.

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar 82,54 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018 sebesar 81,36. Sejak Tahun 2015-2019, IKM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan, menunjukkan kualitas pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar 66,88, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 66,59. Sejak Tahun 2014-2019, IKLH Jawa Tengah terus meningkat. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan melalui upaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Visi itu dijabarkan ke dalam 4 (empat) Misi Pembangunan.

Adapun tingkat capaian masing-masing Misi pada Tahun 2019, dapat digambarkan melalui capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dikategorikan dalam 5 (lima) tingkat ketercapaian yaitu Sangat Tinggi ($\geq 91\%$), Tinggi (76%-90,99%), Sedang (66%-75,99%), Rendah (51%-65,99%) dan Sangat Rendah ($\leq 50,99\%$). Penjelasannya sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyub untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Pertama ini didukung 3 indikator yaitu persentase penurunan konflik SARA, Indeks Toleransi dan Persentase tindak pidana yang ditangani. Semua indikator tersebut tingkat ketercapaiannya Sangat Tinggi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemantauan berbagai konflik, bahaya laten terorisme, radikalisme dan tindakan intoleransi lainnya, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesadaran hukum, kewaspadaan dan deteksi dini, sehingga terpelihara kondusivitas Jawa Tengah.

Misi 2: Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota. Misi Kedua ini didukung oleh 8 indikator antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Opini BPK, indeks SPBE dan nilai SAKIP. Seluruh indikator tingkat ketercapaiannya Sangat Tinggi. Upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan dilakukan antara lain dengan penerapan birokrasi yang semakin *casual* serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi 3: Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Indikator kinerja sasaran yang mendukung misi ini sebanyak 19 indikator antara lain angka kemiskinan, Indeks Gini dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat ketercapaian indikator 14 (empat belas) indikator kinerja Sangat Tinggi, 3 (tiga) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian Tinggi, sementara masih 2 (dua) indikator kinerja tingkat ketercapaiannya masih Sangat Rendah. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain melalui bantuan kepada masyarakat miskin, serta menggerakkan ekonomi rakyat melalui kemudahan akses modal dan usaha, pengembangan kawasan industri serta terus meningkatkan penyediaan infrastruktur di seluruh wilayah.

Misi 4: Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan.

Misi 4 memiliki 10 indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tingkat ketercapaian seluruh indikator Sangat Tinggi. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Guna meningkatkan kualitas SDM di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pembangunan kebudayaan melalui pendidikan karakter, pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2019, pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan pada

upaya peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dan pemanfaatan iptek. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas program pembangunan daerah, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Prioritas Pertama: Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan melalui 14 program prioritas daerah dengan 49 indikator. Adapun tingkat ketercapaian seluruh indikator (100%) adalah Sangat Tinggi sebagaimana tersaji dalam Buku II. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan kolaborasi seluruh *stakeholder*, perluasan sasaran, penguatan basis data, dan pendampingan desa miskin yang berkelanjutan.

Prioritas Kedua: Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui 34 program prioritas daerah dengan 95 indikator kinerja. Tingkat ketercapaian kinerja menunjukkan 89 indikator kinerja (93,68%) adalah Sangat Tinggi; 3 indikator kinerja (3,16%) adalah Tinggi; dan hanya 3 indikator kinerja (3,16%) Rendah dan Sangat Rendah. Penguatan daya saing ekonomi daerah akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas, kontinuitas dan inovasi produk daerah.

Prioritas ketiga: Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM Dalam Rangka Mendukung Bonus Demografi, dilaksanakan melalui 30 program prioritas daerah dengan 324 indikator kinerja. Tingkat ketercapaian kinerja menunjukkan 286 indikator kinerja (88,27%) adalah Sangat Tinggi; 11 indikator kinerja (3,40%) Tinggi; dan 8 indikator kinerja (2,47%) Sedang. Sementara 5 indikator kinerja (1,54%) Rendah; dan 14 indikator kinerja (4,32%) Sangat Rendah. Upaya meraih bonus demografi dilakukan dengan melalui pembangunan

Sumber Daya Manusia utamanya pada peningkatan akses dan kualitas layanan kependidikan dan kesehatan.

Prioritas Keempat: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana, dilaksanakan melalui 10 program prioritas daerah dengan 99 indikator kinerja. Adapun tingkat ketercapaian kinerja ditunjukkan dengan 96 indikator kinerja (96,97%) Sangat Tinggi; 2 indikator kinerja (2,02%) Rendah; dan 1 indikator kinerja (1,01%) Sangat Rendah. Adapun upaya yang akan terus dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari hulu ke hilir serta penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko.

Prioritas Kelima: Perwujudan Ketahanan Pangan dan Energi, dilaksanakan melalui 5 program prioritas daerah dengan 43 indikator kinerja. Tingkat ketercapaian seluruh indikator kinerja (100%) tersebut adalah Sangat Tinggi. Upaya yang akan terus dilakukan, yaitu peningkatan kualitas dan aksesibilitas pangan, pemerataan energi serta pengembangan energi baru terbarukan.

Prioritas Keenam: Pengurangan Kesenjangan Wilayah, dilaksanakan melalui 8 program prioritas daerah dengan 60 indikator kinerja. Tingkat ketercapaian seluruh indikator (100%) adalah Sangat Tinggi. Upaya yang akan terus dilakukan, yaitu penguatan infrastruktur konektivitas, pemerataan sarana prasarana dasar dan ekonomi serta menciptakan pusat pertumbuhan baru.

Prioritas Ketujuh: Pemanjapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, dilaksanakan melalui 44 program prioritas daerah dengan 284 indikator kinerja. Tingkat ketercapaian kinerja adalah 269 indikator kinerja (94,72%) Sangat Tinggi; 4 indikator kinerja (1,41%)

Tinggi; 4 indikator kinerja (1,41%) Sedang. Sementara 2 indikator kinerja (0,70%) tingkat ketercapaiannya Rendah; dan 5 indikator kinerja (1,76%) Sangat Rendah. Upaya peningkatan pelayanan publik akan terus dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi publik, menjaga integritas "Tetep mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi".

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah diukur dari ketercapaian IKU yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Tahun 2019 terdapat 154 IKU pada 41 Perangkat Daerah. Adapun tingkat ketercapaian kerjanya adalah sebagai berikut: 145 IKU (94,15%) Sangat Tinggi; 5 IKU (3,25%) Tinggi; 2 IKU (1,30%) Rendah; dan 2 IKU (1,30%) Sangat Rendah. Hal ini menunjukkan program-program yang disusun oleh Perangkat Daerah sudah efektif untuk mendukung capaian visi misi Kepala Daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami laporkan kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut: *Pertama*, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp25,872 Triliun, atau 98,22% dari target sejumlah Rp26,340 Triliun. Realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sejumlah Rp1,170 Triliun atau 4,74%, dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu Rp24,702 Triliun.

Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp14,452 Triliun atau 99,75% dari target; Dana Perimbangan dengan realisasi sebesar Rp11,334 Triliun atau 96,33% dari target; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebesar Rp85,57 Miliar sesuai target. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah memberi kontribusi 55,85%, Dana Perimbangan

berkontribusi sebesar 43,80% dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi sebesar 0,33% terhadap Realisasi Pendapatan Daerah.

Kedua, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp27,750 Triliun, dengan realisasi Rp26,114 Triliun atau 94,10%. Dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018, terdapat kenaikan sebesar 6,68%. Belanja Daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme belanja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp1,630 Triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp220,33 Miliar.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Hasil pelaksanaan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan, dan 6 fungsi penunjang urusan pemerintahan, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Pertama, **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** terdapat 6 urusan, yaitu:

- 1. Urusan Pendidikan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp6,276 Triliun, atau 22,30% dari total APBD, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4,065 Triliun dan Belanja Langsung Rp2,210 Triliun. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,97% dan keuangan 94,96%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 177 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaiannya adalah 152 indikator (85,88%)

Tinggi dan Sangat Tinggi, 6 indikator (3,39%) Sedang, dan 19 indikator (10,73%) Rendah dan Sangat Rendah.

Penghargaan pendidikan yang diraih di tingkat nasional pada Tahun 2019 sebanyak 137 penghargaan, antara lain 8 medali emas pada Olimpiade Guru Nasional, 8 medali emas pada Olimpiade Siswa Nasional, 15 medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan 11 medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan tingkat Internasional sebanyak 10 Penghargaan.

- 2. Urusan Kesehatan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp2,713 Triliun, atau 9,77% dari total APBD, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp577,20 Miliar dan Belanja Langsung Rp2,136 Triliun. Adapun realisasi fisik 96,07% dan keuangan 84,64%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 7 program, dengan 100 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian kinerja 99 indikator (99%) Sangat Tinggi dan 1 indikator (1%) Sedang. Penghargaan yang diperoleh Tahun 2019 sebanyak 13 penghargaan, antara lain Provinsi paling inovatif dalam rangka percepatan implementasi program kesehatan kerja dan olah raga; Pemenang Terbaik Kategori "*Innovation in Hospital Management and Government Project*" dan '*Role Model*' Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima".
- 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,** dilaksanakan dengan anggaran Rp1,137 Triliun, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp176,49 Miliar dan Belanja Langsung Rp961,25 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 98,95% dan keuangan 95,26%. Anggaran tersebut untuk mendukung

pelaksanaan 10 program, dengan 64 Indikator Kinerja Program, seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dilaksanakan dengan anggaran Rp27,52 Miliar, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp13,95 Miliar dan Belanja Langsung Rp13,57 Miliar. Realisasi fisik belanja langsung 100% dan keuangan 91,32%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 3 program dengan 4 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian seluruh indikator Sangat Tinggi.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dengan anggaran Rp111,29 Miliar, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp31,66 Miliar dan Belanja Langsung Rp79,62 Miliar. Realisasi fisik 99,19% dan keuangan 94,80%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 8 program dengan 14 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja seluruh indikator Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat nasional antara lain Provinsi Berpartisipasi Aktif Dalam Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Sosial, dilaksanakan dengan anggaran Rp218,82 Miliar, yaitu terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp144,62 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp74,20 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan adalah 97,99%. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan 4 program dengan 31 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja seluruh indikator Sangat Tinggi.

Penghargaan yang diperoleh di tingkat Nasional sebanyak 6 penghargaan, antara lain keberhasilan memperbaiki tingkatan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi mandiri dan mampu; dan Padma Award untuk kategori percepatan perizinan penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang.

Kedua, **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**, terdiri atas 18 urusan, sebagai berikut:

- 1. Urusan Tenaga Kerja**, dilaksanakan dengan anggaran Rp102,82 Miliar, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp77,56 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp25,26 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,46% dan keuangan 97,00%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 17 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian semua indikator adalah Sangat Tinggi.

Adapun Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 5 penghargaan, antara lain Anugerah Paramakarya, Paritrana BPJS Tenaga Kerja dan Juara Terbanyak Seleksi Nasional Calon Kompetitor *ASEAN Skill Competition* ke 13.

- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dilaksanakan dengan anggaran Rp21,81 Miliar, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp9,65 Miliar dan Belanja Langsung Rp12,16 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 98,98%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 5 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian seluruh indikator adalah Sangat Tinggi. Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Provinsi Penggerak Provinsi Layak Anak.
- 3. Urusan Pangan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp38,51 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp19,44 Miliar dan

Belanja Langsung Rp19,07 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,80% dan keuangan 97,46%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 14 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

4. Urusan Pertanahan, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1,86 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,51%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program dengan 1 Indikator Kinerja Program yang memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

5. Urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan dengan anggaran Rp157 Miliar yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp138,25 Miliar dan Belanja Langsung Rp18,74 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan realisasi keuangan 96,16%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 5 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh yaitu bidang Pengendalian Perubahan Iklim pada acara Festival Iklim.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5,05 Miliar dengan Realisasi fisik 100% dan keuangan 95,84%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 3 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan melalui anggaran sebesar Rp1,182 Triliun, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,170 Triliun dan Belanja Langsung Rp11,58

Miliar dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,02%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 9 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 3 penghargaan antara lain Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai apresiasi Pembina terbaik atas prestasi dan komitmen memajukan desa dan Piagam Penghargaan atas dukungan pelaksanaan program Inovasi Desa.

- 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,** dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7,28 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 99,35%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 7 Indikator Kinerja Program yang memiliki tingkat ketercapaian 6 indikator (85,71%) Sangat Tinggi dan 1 indikator (14,29%) Sedang. Penghargaan yang diterima adalah Manggala Karya Kencana yang diberikan kepada Kepala Daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan warganya.
- 9. Urusan Perhubungan,** dilaksanakan dengan anggaran Rp179,19 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp46,85 Miliar dan Belanja Langsung Rp132,33 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 95,23%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program, dengan 24 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi. Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2019 dari Presiden

Republik Indonesia karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai mampu menata transportasi publik dengan baik.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan dengan anggaran Rp68,35 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp19,41 Miliar dan Belanja Langsung Rp48,93 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 93,66%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 3 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan yang diperoleh 3 jenis yaitu: Peringkat Satu Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Peringkat Satu untuk Penerapan Layanan Pengaduan Masyarakat; dan Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi paling inovatif 2019 dalam *Innovative Government Award 3*.

11. Urusan Koperasi dan UKM, dilaksanakan dengan anggaran Rp75,77 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp17,15 Miliar dan Belanja Langsung Rp58,62 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 94,31%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 8 program, dengan 10 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

12. Urusan Penanaman Modal, dilaksanakan dengan anggaran Rp23,14 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp12,93 Miliar dan Belanja Langsung Rp10,21 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 97,56%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 6 program, dengan 8 Indikator Kinerja

Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Prestasi tingkat Nasional yang diperoleh yaitu sebagai '*Role Model*' Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan kategori nilai A; dan Anugerah Gatra Katagori Daerah Paling banyak menarik inventasi.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan dengan anggaran Rp491,88 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp34,57 Miliar dan Belanja Langsung Rp457,30 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 93,98%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 9 Indikator Kinerja Program yang seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 6 penghargaan antara lain Juara Umum Kejurnas antar PPLP Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Takraw serta Juara 2 Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Pendidikan.

14. Urusan Statistik, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3,44 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 99,27%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 2 Indikator Kinerja Program yang memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

15. Urusan Persandian, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2,16 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 96,98%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 1 Indikator Kinerja Program yang memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

16. Urusan Kebudayaan, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung Rp21,52 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Hibah) sebesar Rp3,17 Miliar dan Belanja Langsung Rp18,35 Miliar. Realisasi fisik 99,94% dan keuangan 90,63%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 6 Indikator Kinerja Program yang memiliki tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Bidang Kebudayaan sebanyak 17 penghargaan, diantaranya Penetapan 9 Warisan Budaya Tak Benda Jawa Tengah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

17. Urusan Perpustakaan, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5,75 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 94,47%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 2 program dengan 4 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja dari semua indikator tersebut adalah Sangat Tinggi.

Penghargaan Tingkat Nasional yang diperoleh yaitu Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terbaik dalam Implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

18. Urusan Kearsipan, dilaksanakan dengan anggaran Rp29,76 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp26,19 Miliar dan Belanja Langsung Rp3,57 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,94%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program dengan 3 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja semua indikator adalah Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat nasional untuk pengelolaan kearsipan yaitu dengan Kategori "Sangat Baik".

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan kinerja dari 8 Urusan Pilihan, sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan dengan anggaran Rp99,01 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp42,60 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp56,41 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,99% dan keuangan 96,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 24 Indikator Kinerja Program. Seluruh indikator dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi dan Tinggi.

2. Urusan Pariwisata, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp48,72 Miliar dengan Realisasi fisik 100% dan keuangan 91,80%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 5 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja 4 indikator (80%) Sangat Tinggi dan 1 indikator (20%) Tinggi.

Penghargaan yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebanyak 2 penghargaan, yaitu: Provinsi Besar Terbaik Sektor Pariwisata dan Satyalancana kepariwisataan.

3. Urusan Pertanian, dilaksanakan dengan anggaran Rp374,66 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp155,35 Miliar dan Belanja Langsung Rp219,30 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 98,29% dan keuangan 89,45%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program dengan 27 Indikator Kinerja Program. Sebanyak 24 indikator (88%) memiliki tingkat ketercapaian kinerja Sangat Tinggi dan Tinggi, dan 3 indikator (12%) Rendah dan Sangat Rendah.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 2 Penghargaan yaitu: Penghargaan Abdi Bhakti Tani dan *Best Achievement* Adi Praja Satwa Sawaka pada "*Livestock Services of*

Provincial Office Region A” yaitu pemerintah Provinsi yang berperan dalam pengembangan peternakan di Indonesia.

- 4. Urusan Kehutanan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp189,82 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp138,25 Miliar dan Belanja Langsung Rp51,57 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 96,66% dan keuangan 92,30%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program dengan 51 Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian kinerja seluruhnya Sangat Tinggi.

Penghargaan tingkat Nasional yang diperoleh yaitu sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.

- 5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**, dilaksanakan dengan anggaran Rp69,07 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp27,93 Miliar dan Belanja Langsung Rp41,14 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,38% dan keuangan 94,04%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program dengan 54 Indikator Kinerja Program. Sebanyak 51 indikator (94,44%) dengan tingkat ketercapaian kinerja Sangat Tinggi dan 3 indikator (5,56%) Rendah dan Sangat Rendah.

- 6. Urusan Perdagangan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp58,19 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp35,17 Miliar dan Belanja Langsung Rp17,29 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 94,24%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program dengan 5 Indikator Kinerja Program. Seluruh indikator memiliki tingkat ketercapaian kinerja Sangat Tinggi.

Penghargaan Tingkat Nasional yang diperoleh sebanyak 6 penghargaan, antara lain Kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru dan Kategori Berkinerja Penanaman Modal Dalam Negeri.

7. Urusan Perindustrian, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 93,14%. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 5 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian seluruh indikator kinerja adalah Sangat Tinggi.

Penghargaan yang diterima bidang industri sebanyak 3 penghargaan, yaitu Kategori Makanan Ringan/Cemilan, Kategori Produk Makanan Khas Daerah dan Pangan Olahan Siap Saji.

8. Urusan Transmigrasi, dilaksanakan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3,08 Miliar. Realisasi fisik 98,96% dan keuangan 81,87%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program, dengan 4 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian seluruh indikator adalah Sangat Tinggi.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan kinerja dari 7 (tujuh) **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:**

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, dilaksanakan dengan anggaran Rp41,62 Miliar Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp25,19 Miliar dan Belanja Langsung Rp16,43 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,59%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program, dengan 7 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian seluruh indikator adalah Sangat Tinggi.

Penghargaan pada Tahun 2019 yaitu Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik Pertama Tingkat Nasional.

2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Keuangan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp281,47 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp194,46 Miliar dan Belanja Langsung Rp87,01 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 99,89% dan keuangan 94,69%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 3 program, dengan 164 indikator Kinerja Program. Sebanyak 153 indikator (93,29%) memiliki tingkat ketercapaian kinerja Sangat Tinggi dan Tinggi, 4 indikator (2,44%) sedang, dan 7 indikator (4,27%) rendah dan sangat rendah.

Penghargaan yang diterima di bidang keuangan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp222,60 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp112,02 Miliar dan Belanja Langsung Rp110,57 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 92,81% dan keuangan 77,56%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 4 program dengan 13 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja seluruh indikator adalah Sangat Tinggi.

Penghargaan yang diraih di tingkat nasional sebanyak 3 penghargaan antara lain sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Pertama dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS, serta Penghargaan BKN Awards Kategori Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi.

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Penelitian dan Pengembangan**, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp12,29 Miliar. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,77%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 1 program yang

memiliki 1 Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian Sangat Tinggi.

Penghargaan terkait Kelitbangan Tahun 2019 sebanyak 2 penghargaan, yaitu *Innovative Government Award (IGA)* dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Penghargaan Budhipura dari Kemenristek dan Dikti.

5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Pengawasan**, dilaksanakan dengan anggaran Rp36,37 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp19,26 Miliar dan Belanja Langsung Rp17,11 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 100% dan keuangan 96,47%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 5 program, dengan 13 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja seluruhnya Sangat Tinggi.

Penghargaan yang diraih di tingkat nasional sebanyak 4 Penghargaan antara lain Peringkat I Kinerja Pengawasan Terbaik; dan Pemerintah Daerah Terbaik dalam Capaian Aksi Korsupgah.

6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang **Fungsi Lainnya**, dilaksanakan dengan anggaran Rp469,49 Miliar terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp283,22 Miliar dan Belanja Langsung Rp186,26 Miliar. Realisasi fisik Belanja Langsung 97,85% dan keuangan 89,75%. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 10 program dengan 60 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian kinerja seluruh indikator adalah Sangat Tinggi dan Tinggi.

Penghargaan yang diraih sebanyak 2 penghargaan yaitu Juara Terbaik Pertama Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2019 serta Penghargaan Sebagai Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018 yang diberikan pada Tahun 2019.

7. **Non Urusan/Belanja Administrasi Umum (EX. BAU)**, dilaksanakan dengan anggaran Rp974,28 Miliar. Realisasi fisik 98,90% dan keuangan 90,20%. Anggaran tersebut untuk mendukung

pelaksanaan 2 program yang memiliki 255 Indikator Kinerja Program. Tingkat ketercapaian semua indikator adalah Sangat Tinggi.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pembangunan yang bersumber dari Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan Penugasan.

Alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp546,44 Miliar yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah meliputi 8 Program dan 33 Kegiatan dengan realisasi fisik 95,95% dan keuangan 92,75%.

Alokasi total anggaran Dekonsentrasi sebesar 461,28 Miliar yang dilaksanakan oleh 17 Perangkat Daerah meliputi 45 Program dan 128 Kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 98,38% dan keuangan 94,92%.

Alokasi Penugasan terdiri dari Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1,177 Triliun (4,24% dari total APBD) untuk membiayai total 1.773 kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 94,75% dan pencairan keuangan Rp1,050 Triliun (89,25%), yang meliputi jenis bantuan TMMD, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), Bantuan Sarana Prasarana dan Bantuan Pendidikan. Selanjutnya Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1,380 Triliun yang dilaksanakan melalui 4 jenis bantuan keuangan, yaitu bantuan peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan rintisan desa berdikari menjadi kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan Bantuan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Capaian berbagai indikator makro pembangunan Jawa Tengah semakin membaik dari tahun 2018, antara lain: pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,41%; PDRB Per Kapita meningkat sebesar

6,71%; inflasi sangat rendah pada angka 2,81%; gini rasio turun menjadi 0,358; Indeks Williamson turun menjadi 0,619; Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 106; Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,49%; jumlah penduduk miskin 3,679 juta orang (10,58%) atau turun 188 ribu orang; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,73; Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat menjadi 91,89; Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) meningkat menjadi 76,99; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) naik menjadi 82,54; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada angka 66,88.

Pencapaian Visi dan Misi pada target kinerja Tahun 2019 dengan 40 indikator tercapai 95% atau sejumlah 38 indikator dengan ketercapaian Tinggi dan Sangat Tinggi; pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan 954 indikator tercapai 95,39% atau sejumlah 910 indikator dengan ketercapaian Sangat Tinggi dan Tinggi; dan pencapaian Indikator Kinerja Utama pada 41 OPD tercapai 97,40% atau 150 indikator dengan ketercapaian Tinggi dan Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, dari 1.209 Indikator Kinerja Program, sebanyak 1.165 indikator (96,36%) memiliki tingkat capaian yang Sangat Tinggi dan Tinggi, dan hanya 12 indikator (0,99%) memiliki tingkat capaian yang Sedang. Sementara 32 indikator (2,65%) lainnya memiliki tingkat capaian Rendah dan Sangat Rendah sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius ke depan.

Berkat berbagai capaian kinerja yang Sangat Tinggi dan membanggakan tersebut di atas, serta kerja keras dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dukungan dan kerjasama dari DPRD Provinsi Jawa Tengah serta para *stakeholder*, pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh 239 penghargaan di Tingkat Nasional maupun Internasional dengan perincian 60 penghargaan di terima oleh Pemerintah Provinsi, dan 179 diterima oleh insan pendidikan/ kelompok/swasta sebagai binaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain berbagai capaian kinerja Visi dan Misi, serta Program Pembangunan tersebut di atas, pada awal Juli 2019, Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, meminta agar Provinsi Jawa Tengah target pertumbuhan ekonominya bisa meningkat menjadi 7 persen pada Tahun 2019-2024. Berkenaan dengan permintaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespon secara positif dengan menetapkan 3 (tiga) *quickwins*, dengan harapan dapat langsung dikerjakan dan selesai dengan cepat meliputi pembangunan Kawasan Industri Brebes, Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur melalui pengembangan 22 sektor pembangunan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa selama Tahun 2019 masih terdapat kekurangan dan keterbatasan kami dalam menjalankan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran konstruktif untuk perbaikan kinerja kami ke depan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dewan yang mulia. Semoga Allah SWT senantiasa meridloi langkah dan upaya kita guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari "*Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*".

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Damai Sejahtera

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Namo Buddhaya

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP